

Abstrak

Sejarah hukum tanah di Indonesia pada dasarnya terbagi atas dua macam yaitu hukum tanah yang berlaku sebelum Indonesia merdeka dan setelah berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), eigendom verponding setelah tahun 1960 atau setelah adanya UUPA diberikan kesempatan untuk pemiliknya yang telah menempatkan dan menguasai tanah tersebut melakukan konversi, namun terdapat banyak sekali tanah yang belum di lakukan konversi setelah adanya UUPA, hal inilah yang menjadikan timbulnya permasalahan salahsatunya ialah permasalahan di bidang Pidana, Tulisan ini membahas mengenai penyebab timbulnya permasalahan akibat Hak bekas Eigendom tidak di Konversi yaitu salahsatunya terjadinya penyerobotan tanah oleh Pihak yang tidak ada hubungannya dengan Tanah tersebut dan Pihak Pihak yang dapat dipertanggungjawabkan akibat timbulnya sertipikat tanah di atas Hak kepemilikan orang lain. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode Statute Approach dan pendekatan konseptual Approach dan akan dibahas mengenai Timbulnya Sertipikat HGB Di Atas Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Yang Berimplikasi Pidana dan Pertanggungjawanan Pihak yang menerbitkan HGB diatas tanah Hak bekas Eigendom Verponding milik orang lain Bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Timbulnya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menimbulkan perbuatan pidana dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pihak pemilik hak di atas tanah bekas Eigendom Verponding milik orang lain

Kata Kunci : Tanah, Hak Eigendom, UUPA, Konversi, Penyerobotan

Abstract

The history of land law in Indonesia is basically divided into two types, namely the land law that was in effect before Indonesia's independence and after the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA), In the context of former western property rights or eigendom verponding after 1960 or after the existence of the UUPA, it was given the opportunity to The owner who has placed and controlled the land has converted, but there are a lot of land that has not been converted after the UUPA, this is what causes the problem to arise, one of which is the problem in the criminal field. This paper discusses the causes of problems due to Eigendom's former rights not Conversion is one of the cases of land grabbing by a party that has nothing to do with the land and a party who can be accounted for due to the emergence of a land certificate on the ownership rights of another person. This research uses the Statute Approach method and the conceptual approach and will discuss the emergence of an HGB certificate on the former Eigendom Verponding land which has criminal implications and liability. Parties who issue HGB on land. The emergence of a Building Use Right Certificate which has resulted in a criminal act and To find out and analyze the accountability of the owner of the right on the former Eigendom Verponding land owned by someone else

Keywords: Land, Eigendom Rights, Agrarian Law, Conversion, Encroachment

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan